



Analisis Manajemen Pengelolaan Keuangan: Studi Kasus di SMA Muhammadiyah 1 Blitar

Abdul Rozak Ali Maftuhin ^{1*}, Sunarto Sunarto ²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Email : adrozak22@webmail.umm.ac.id ¹, sunarto@umm.ac.id ²

Alamat: Gedung GKB IV Kampus III, Jl. Raya Tlogomas 246 Malang, Jawa Timur

Korespondensi penulis : adrozak22@webmail.umm.ac.id *

Abstract, *The cost of education is a crucial component in the implementation of education, as the educational process cannot proceed without financial support. This study aims to describe the collection and management of finances at SMA Muhammadiyah 1 Blitar. The research approach used is qualitative research with a case study design. The researcher conducted interviews with the school principal and treasurer, document analysis, and observations. The results of the study show that school finances are sourced from government assistance, such as BOS (School Operational Assistance) and BPOPP (Operational Assistance for Education Funding), tuition fees (SPP), development fees (DPP), the foster parents' movement program, and donations from Lazismu. In the aspect of financial management, the school implements mechanisms for planning, execution, recording, reporting, and accountability while adhering to the principles of transparency, accountability, effectiveness, and efficiency.*

Keywords: *School Management, Financial Management, Muhammadiyah*

Abstrak, Biaya pendidikan adalah komponen yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan, di mana proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan finansial. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penghimpunan dan pengelolaan keuangan di SMA Muhammadiyah 1 Blitar. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Peneliti menggunakan wawancara kepada kepala sekolah dan bendahara sekolah, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghimpunan keuangan sekolah bersumber dari bantuan pemerintah berupa BOS dan BPOPP, SPP dan DPP, program gerakan orang tua asuh, dan bantuan dari Lazismu. Pada aspek pengelolaan keuangan, sekolah menerapkan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

Kata kunci: Manajemen Sekolah, Pengelolaan Keuangan, Muhammadiyah

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan terpenting saat ini. Biaya pendidikan adalah komponen yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan finansial (Munir, 2013). Pengelolaan keuangan yang efektif merupakan kunci keberhasilan sebuah sekolah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wijaya, biaya pendidikan yang tinggi tidak selalu menjamin kualitas pendidikan yang baik. Kualitas pendidikan lebih dipengaruhi oleh bagaimana sekolah mengelola anggaran yang dimilikinya (Hasibuan, 2021).

Tanpa pendidikan, peluang seseorang untuk maju dan berkembang akan sangat terbatas. Mereka akan kesulitan untuk memahami dunia di sekitar mereka dan mengambil keputusan yang bijak. Sebagaimana dikatakan Martin Luther King, pendidikan adalah akar dari kehidupan. Untuk itu, kurikulum harus diterapkan secara efektif agar pendidikan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya (Zulaiha et al., 2023).

Pendidikan tidak lain merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting karena pendidikan memiliki tugas untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pembangunan bangsa dan negara (Pradana et al., 2021). Di sisi lain, pendidikan diharapkan mampu menjawab semua tantangan zaman dan dapat membina generasi bangsa, agar masyarakat menjadi handal dan berkualitas tinggi, dengan karakter yang kuat, identitas yang jelas, dan mampu menghadapi masalah masa kini dan yang akan datang (Azhar & Sikumambang, 2018).

Untuk memastikan penggunaan dana sekolah yang efektif dan efisien, pengelolaan keuangan sekolah harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang baik. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007. Peraturan tersebut menegaskan bahwa pengelolaan keuangan sekolah meliputi lebih dari sekadar mengelola uang tunai, tetapi juga mencakup pengelolaan aset keuangan lainnya. Kepala sekolah bertanggung jawab atas pengawasan pengelolaan keuangan di sekolah, namun pengawasan juga dilakukan oleh pihak eksternal seperti pengawas fungsional daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan. (Arif Mujahidin et al., 2022).

Manajemen keuangan sekolah berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa keempat prinsip ini digunakan dalam proses pengelolaan keuangan sekolah mulai dari perencanaan, realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan, pengawasan dan pemeriksaan hingga pertanggungjawaban (Hastuti & Fitriani, 2024). Baik sekolah negeri maupun swasta memiliki tugas yang sama dalam mengelola keuangan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen keuangan. Sekolah swasta adalah lembaga pendidikan yang mencari sumber daya keuangannya sendiri untuk memberikan layanan pendidikan. Agar dapat mencapai layanan pendidikan yang berkualitas optimal, sekolah swasta harus menjalankan manajemen keuangan (Kurniady et al., 2018).

Pada masa Pergerakan Nasional, Muhammadiyah didirikan dengan tujuan untuk memajukan agama, masyarakat, dan pendidikan. Dalam konteks agama, Muhammadiyah aktif melakukan dakwah Islam. Di bidang sosial, Muhammadiyah berkontribusi melalui pendirian

panti asuhan, sementara dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah mendirikan berbagai lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi (Sormin et al., 2022). Salah satu sekolah atau lembaga pendidikan yang didirikan adalah SMA Muhammadiyah 1 Blitar.

SMA Muhammadiyah 1 Blitar sebagai salah satu sekolah swasta di bawah naungan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Non-Formal (Dikdasmen dan PNF) turut menyelenggarakan pendidikan dengan pengelolaan keuangan secara mandiri. Secara umum, manajemen keuangan sebenarnya telah dijalankan dengan baik oleh semua sekolah. Namun, setiap sekolah memiliki perencanaan dan pengelolaan yang berbeda. Untuk itu, perlu dilakukan kajian untuk mengetahui kegiatan manajemen keuangan di SMA Muhammadiyah 1 Blitar.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan masalahnya adalah (1) bagaimana penghimpunan dana pendidikan di SMA Muhammadiyah 1 Blitar? (2) bagaimana pengelolaan keuangan di SMA Muhammadiyah 1 Blitar?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (John W. Creswell, 2015). Lokasi penelitian berada di SMA Muhammadiyah 1 Blitar, Jawa Timur. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah dan bendahara sekolah. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, dokumentasi, dan observasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model induktif; model ini bertujuan untuk memperjelas proses reduksi data guna menciptakan makna dari data mentah yang dikumpulkan. Temuan-temuan ini digunakan untuk menginterpretasikan informasi dasar; peneliti menggunakan wawancara mendalam sebagai tindak lanjut dari temuan-temuan tersebut. Peneliti juga menambahkan observasi sebagai sumber penting dalam triangulasi data. Validitas data dilakukan melalui uji triangulasi teknik.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana (Miles et al., 2014) untuk menganalisis data: 1) Kondensasi data (melakukan seleksi, fokus, dan perubahan data yang diperoleh dari catatan lapangan). Penelitian ini membagikan data dari wawancara tidak terstruktur dan observasi dengan responden. Kemudian, ringkasan dibuat agar lebih mudah menganalisis data dan melanjutkan ke langkah berikutnya. 2) Penyajian data (menampilkan data yang telah dikompresi dari kumpulan informasi sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan). Pada langkah ini, peneliti menampilkan data sesuai dengan data yang telah disiapkan dan disusun secara berurutan. 3) Menarik kesimpulan (setelah melakukan

reduksi data dan menampilkan data yang diperoleh, peneliti menarik kesimpulan dari temuan di lapangan berdasarkan permasalahan penelitian).

3. HASIL PENELITIAN

Kegiatan Pembiayaan di SMA Muhammadiyah 1 Blitar

Dalam rangka menjalankan segala aktivitas pendidikan, SMA Muhammadiyah 1 Blitar memiliki sumber pendapatan keuangan, di antaranya:

1. Dana dari Pemerintah

Dana dari pemerintah diberikan melalui anggaran rutin, yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat dan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) dari pemerintah provinsi. Pengeluaran dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS dan BPOPP harus sesuai dengan anggaran dan peraturan yang ada untuk membiayai seluruh kegiatan operasional sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan.

2. Dana dari Komite

Dana ini diterima sekolah dari komite sekolah. Adapun dana atau uang komite meliputi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP). Dana SPP dibayarkan setiap bulan oleh siswa, sedangkan DPP dibayarkan setiap awal tahun ajaran baru. Namun pada realitasnya, SPP dan DPP tidak terhimpun maksimal karena mayoritas siswa berasal dari keluarga yang kurang mampu sehingga terkendala pembiayaan rutin.

3. Donatur GOTA

Selain dana yang sudah peneliti sebutkan di atas, SMA Muhammadiyah 1 Blitar juga menghimpun dana pendidikan dari donatur. Dalam hal ini, kepala sekolah membentuk tim yang disebut Gerakan Orang Tua Asuh (GOTA). Tim ini akan mencari dan menghimpun dana dari donatur yang berasal dari kalangan pengurus Muhammadiyah. Dana ini biasanya berupa kontribusi sukarela yang tidak mengikat dari pihak internal. Akan tetapi ada pula yang mengikatkan dirinya dengan mengganggu semua pembiayaan siswa tertentu. Sumbangan sukarela ini adalah bentuk kepedulian untuk membantu kegiatan operasional dan mendukung kelancaran aktivitas sekolah. GOTA ini dibentuk karena banyak siswa dari kalangan kurang mampu yang terkendala pembiayaan uang komite.

4. Bantuan Lazismu

Lazismu sebagai lembaga zakat, infaq, dan sadaqah milik Muhammadiyah turut menjadi sumber pendanaan di SMA Muhammadiyah 1 Blitar. Hampir sama seperti GOTA, Lazismu memberikan bantuan dana pendidikan yang ditujukan kepada siswa perseorangan. Bedanya, Lazismu lebih kepada pelunasan tanggungan siswa yang sudah terakumulasi. Bantuan dana pendidikan dari Lazismu memerlukan syarat, seperti ditujukan untuk siswa yang kurang mampu dan harus mendapatkan surat rekomendasi dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) di mana siswa tinggal.

Manajemen Keuangan di SMA Muhammadiyah 1 Blitar

Manajemen keuangan di lembaga sekolah adalah proses yang mencakup beberapa tahapan penting, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pertanggungjawaban atau pengawasan, dan pelaporan. Setiap tahap memegang peranan krusial untuk memastikan dana yang tersedia dikelola secara efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat mendukung segala aktivitas pendidikan di SMA Muhammadiyah 1 Blitar. Adapun penjabaran lengkap setiap proses sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan, sekolah memulai prosesnya dengan menyusun anggaran di awal tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS). Perencanaan ini dirancang untuk mencakup kebutuhan operasional sekolah selama satu tahun ajaran, termasuk alokasi untuk kegiatan pembelajaran, gaji guru, perawatan fasilitas, hingga pengembangan program pendidikan. Dari RKS tersebut kemudian sekolah menyusun dan menuangkannya ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Namun, kendala sering muncul dalam proses ini, terutama saat rapat dengan wali siswa yang diwakili komite. Kesulitan utama adalah mencapai kesepakatan terkait besaran iuran pendidikan, yakni SPP dan DPP. Hal ini menjadi tantangan besar, mengingat latar belakang ekonomi orang tua siswa yang beragam, sehingga membutuhkan pendekatan yang bijaksana dari pihak sekolah agar tidak membebani, tetapi tetap memenuhi kebutuhan operasional.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, pengelolaan penerimaan dan pengeluaran dana dilakukan dengan cermat, disertai bukti pembayaran atau bukti transaksi yang sah. Bukti-bukti ini berfungsi sebagai dokumen pendukung untuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait, baik internal maupun eksternal. Semua dana yang dikeluarkan diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan, seperti pembelian alat pembelajaran,

pengadaan fasilitas, atau penyelenggaraan kegiatan siswa. Adapun tantangan yang dihadapi dalam tahap ini adalah kesulitan dalam penagihan pembayaran yang belum dibayarkan oleh orang tua siswa. Kondisi ini dapat menghambat kelancaran operasional sekolah jika tidak ditangani secara tepat waktu.

Kondisi inilah yang kemudian alternatif pembiayaan seperti program GOTA dan bantuan dari Lazismu memiliki andil yang cukup besar untuk menutup kekurangan dana kegiatan maupun operasional agar tetap bisa berjalan. Menanggapi hal ini, informan AA selaku kepala sekolah menjelaskan:

“Tidak bisa dipungkiri kalau siswa kami mayoritas berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Dengan realitas itu, akhirnya kami berupaya semaksimal mungkin agar sekolah tetap berjalan sebagaimana mestinya, meski ada pembiayaan yang belum tergenapi. Sekolah kami cukup toleran dalam memahami kondisi itu. Wali siswa kami berikan kesempatan mengangsur atau bahkan membayar dana pendidikan sesuai kemampuan. Termasuk dengan adanya GOTA dan Lazismu, tentunya sangat membantu.”

Sebagai upaya *controlling* keuangan, kepala sekolah memberlakukan sistem memo internal untuk setiap pengajuan atau pencairan dana di atas nominal Rp. 500.000. Memo internal tersebut berisikan pengajuan kepada kepala sekolah disertai proposal sederhana yang memuat latar belakang dan tujuan pengajuan, item dan besaran yang diajukan, dan penanggung jawab. Memo yang disetujui kepala sekolah akan didisposisikan ke bendahara umum sekolah untuk pencairan dana. Informan AA mengatakan, sistem memo internal seperti ini memudahkan kepala sekolah melakukan pengawasan dana keluar, sehingga tidak ada pengeluaran (dengan nominal tertentu) yang tidak diketahui kepala sekolah. sekaligus memudahkan bendahara melakukan pendataan dan pelaporan.

3. Tahap Pencatatan

Proses pencatatan keuangan di SMA Muhammadiyah 1 Blitar telah dilakukan dengan baik dan sesuai standar yang berlaku. Semua transaksi dicatat dengan rinci, tanpa adanya catatan utang kepada pihak bank, sehingga menunjukkan pengelolaan yang sehat. Dalam praktiknya, SMA Muhammadiyah 1 Blitar memiliki bendahara yang terdiri dari bendahara umum, bendahara BOS, dan bendahara BPOPP.

Bendahara umum memiliki fungsi menerima dana komite, mencairkan, mencatat, dan melaporkan. Dengan kata lain, semua pengeluaran sekolah harus melalui bendahara umum atas persetujuan kepala sekolah, baik melalui memo maupun tidak. Sedangkan

bendahara BOS dan BPOPP terbatas pada pencatatan pada sektor masing-masing, kemudian dilaporkan kepada bendahara umum. Apabila terdapat pengeluaran yang bersumber dari dana BOS atau BPOPP, bendahara umum akan berkoordinasi dengan bendahara yang bersangkutan untuk mengalur alokasi keuangan.

4. Tahap Pelaporan

Proses pelaporan keuangan di SMA Muhammadiyah 1 Blitar melibatkan tiga pihak utama. Pertama, pelaporan dana BOS dan BPOPP dilakukan kepada Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Wilayah Blitar, mengingat dana ini berasal dari pemerintah pusat dan harus dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua, pelaporan uang komite (SPP dan DPP), GOTA, dan Lazismu dilakukan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Blitar sebagai pemilik sekolah. Setiap laporan disusun secara rinci dan transparan untuk memastikan semua pihak dapat memantau penggunaan dana dengan baik.

5. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan merupakan elemen penting dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan dana. Di SMA Muhammadiyah 1 Blitar, laporan keuangan dapat diaudit oleh pemilik sekolah setiap tahun sebagai bagian dari pengawasan. Audit ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana yang dikelola telah digunakan sesuai dengan rencana dan tujuan yang ditetapkan.

Diskusi

Berdasarkan teori manajemen keuangan, tanggung jawab untuk penyusunan anggaran dan pelaporan keuangan telah diserahkan kepada pihak sekolah, sementara pengawasannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Sekolah memiliki tanggung jawab luas dalam mengoperasionalkan upaya peningkatan kualitas melalui pengelolaan keuangan (Sonedi et al., 2017). Menurut Tooley dan Guthrie, anggaran berfungsi sebagai panduan pengeluaran dan alat pengendalian yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk menjaga efisiensi keuangan. Keterbatasan anggaran dapat berdampak pada sistem pengelolaan keuangan internal (Aini & Effane, 2023).

Dalam pengelolaan dan manajemen sekolah, anggaran memiliki peran penting karena dapat meningkatkan kinerja manajerial dan mengontrol biaya. Di sisi lain, pengeluaran pendidikan dianggap sebagai investasi nyata. Rasio pengeluaran yang tepat dapat dijaga dengan mempertahankan keseimbangan antara pengeluaran untuk guru dan proses pembelajaran siswa serta pengeluaran untuk manajemen (Papilaya, 2022). Menurut Yunas (dalam Misbah et al., 2023), lebih dari 50% total pengeluaran pendidikan dialokasikan untuk

gaji staf (Dahlan Siamat, 2001). Di negara-negara berkembang, bahkan lebih dari 80% pengeluaran digunakan untuk gaji staf, dan di Pakistan, lebih dari 96% dialokasikan untuk itu.

Dalam pelaksanaan manajemen keuangan di SMA Muhammadiyah 1 Blitar, prinsip-prinsip manajemen keuangan menjadi dasar utama. Kegiatan manajemen keuangan telah dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien di bawah kendali kepala sekolah. Hal ini sejalan dengan temuan (dalam Aula et al., 2020) bahwa kepala sekolah memiliki fungsi utama sebagai pihak yang bertanggung jawab terkait pelaksanaan sekolah, termasuk pengawas dan penentu kebijakan sekolah.

Sebagai pimpinan tertinggi, kepala sekolah memiliki otoritas penuh dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana sekolah. Setiap pengeluaran dana harus mendapatkan persetujuan langsung dari beliau. Selain itu, pengelolaan keuangan sekolah harus selalu mengacu pada prinsip-prinsip manajemen keuangan yang baik, di antaranya:

1. Transparansi

Transparansi dalam pengelolaan berarti keterbukaan dalam mengelola semua kegiatan, termasuk dalam hal sumber dan jumlah dana, rincian penggunaan, serta pertanggungjawaban yang jelas. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengetahui informasi keuangan sekolah (Muspawi & Lukita, 2023). Transparansi dilakukan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan sekolah. Hal ini sejalan dengan apa yang sudah dilakukan SMA Muhammadiyah 1 Blitar, di mana dana yang dikelola melibatkan laporan kepada Dinas Pendidikan dan PDM Kota **Blitar sebagai pemilik.**

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan berarti penggunaan dana sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta dapat dengan mudah dipahami (Sukma & Nasution, 2022). Berdasarkan rencana dan peraturan yang berlaku, SMA Muhammadiyah 1 Blitar sudah menggunakan dana dengan penuh tanggung jawab. Dalam melaksanakan tanggung jawab pengelolaan keuangan sekolah, setiap aktivitas yang dilakukan harus sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan didukung oleh bukti penerimaan atau bukti pembayaran.

3. Efektivitas

Efektivitas pengelolaan keuangan dapat dilihat dari kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Artinya, dana yang digunakan dapat membiayai kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan institusi (Widodo et al., 2023). Hal ini sejalan dengan apa yang sudah dilakukan SMA Muhammadiyah 1 Blitar, di

mana pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). Hubungan antara perencanaan, penganggaran, dan realisasi kegiatan telah dilakukan dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan.

4. Efisiensi

Prinsip efisiensi dalam pengelolaan keuangan sekolah mengacu pada upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya keuangan sekolah guna mencapai tujuan peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing layanan pendidikan. Prinsip efisiensi ini mencakup pemanfaatan biaya sekolah untuk kegiatan yang meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan (Muhajir et al., 2023). Sejalan dengan itu, dana pendidikan di SMA Muhammadiyah 1 Blitar telah dialokasikan secara efisien untuk meningkatkan mutu dan layanan pendidikan. Pada aspek kewenangan, kepala sekolah menerapkan kebijakan terbaik dengan adanya sistem memo internal yang berguna untuk pengawasan dan efisiensi biaya.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penghimpunan dana pendidikan di SMA Muhammadiyah 1 Blitar bersumber dari pemerintah berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP), uang komite yang meliputi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP), donatur program GOTA, dan bantuan biaya pendidikan dari Lazismu.

Pada aspek pengelolaan keuangan, SMA Muhammadiyah 1 Blitar menjalankan mekanisme pengelolaan melalui beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan mengedepankan prinsip transparan, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, H. N., & Effane, A. (2023). Urgensi Manajemen Keuangan & Model Penganggaran Pendidikan. In *Karimah Tauhid* (Vol. 2, Issue 1).
- Arif Mujahidin, Farid Setiawan, Hanifah Dwi Astiyani, Anisa Listiyani, & Latsa Alyautami. (2022). Optimalisasi Manajemen Keuangan di MA Darul Ulum Muhammadiyah Galur. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 1(1), 119–124. <https://doi.org/10.55123/mamen.v1i1.59>
- Aula, N., Ikhwan, A., & Nuraini, N. (2020). The Leadership Role of the Principal as Supervisor in Conflict Management at Muhammadiyah 2 Madiun High School, East Java, Indonesia. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 4(1), 90. <https://doi.org/10.35723/ajie.v4i1.112>

- Azhar, A. A., & Sikumambang, A. T. (2018). Students' Trends in Islamic Communication Postgraduate in 2010-2016 State Islamic University of North Sumatera (UINSU). *BIRCI-Journal: Budapest International Reserach And Critics Institute Journal*, 1(4).
- Hasibuan, A. R. D. (2021). Penerapan Tata Kelola Keuangan Pendidikan Sekolah Dasar Pada Akhir Periode Tahun 2020. *Juripol*, 4(1), 304–309. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.11051>
- Hastuti, S. P., & Fitriani, M. I. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Melalui Literasi Keuangan di SD Negeri Tanak Embang. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(3), 2145–2153. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i3.2423>
- John W. Creswell. (2015). *Pendekatan Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kurniady, D. A., Setiawati, L., & Nurlatifah, S. (2018). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Terhadap Mutu Sekolah Menengah Kejuruan. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 17(3), 263–269. <https://doi.org/10.17509/jpp.v17i3.9620>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, 3rd. Thousand Oaks*. CA: Sage.
- Misbah, M., Rangkuti, M. Y., Jonisar, J., Wasliman, I., Dianawati, E., & Paramansyah, A. (2023). Pengelolaan Manajemen Keuangan di SMP Islam Terpadu Permata Gemilang Kota Tangerang Selatan Tinjauan Balance Score-Card (BSC). *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(6), 2808–2819. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v5i6.2597>
- Muhajir, N. M. N., Machdum, B., & Fauzi, A. (2023). Pentingnya Manajemen Pembiayaan dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5, 4684. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.14207>
- Munir, A. (2013). Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam. *At-Ta'dib*, 8(2). <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v8i2.502>
- Muspawi, M., & Lukita, M. (2023). Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Dasar. *Lectura: Jurnal Pendidikan*, 14(1), 99–110. <https://doi.org/10.31849/lectura.v14i1.12237>
- Papilaya, J. (2022). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Pasaman Barat: Penerbit Azka Pusaka.
- Pradana, D. A., Mahfud, M., Hermawan, C., & Susanti, H. D. (2021). Nasionalism: Character Education Orientation in Learning Development. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(4), 4026–4034. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i4.1501>
- Sonedi, S., Jamalie, Z., & Majeri, M. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersumber dari Masyarakat. *FENOMENA*, 9(1), 25. <https://doi.org/10.21093/fj.v9i1.702>

- Sormin, D., Aziz, M., Samsidar, S., Muksana, M., Rahmayanti, M., & Maesaroh, M. (2022). Inovasi Pembaharuan Pendidikan Muhammadiyah. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(02). <https://doi.org/10.30868/ei.v11i02.2357>
- Sukma, A. H. B., & Nasution, A. M. (2022). Manajemen Keuangan Sekolah Dalam Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan di Bekasi. *Al-Fahim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 45–57. <https://doi.org/10.54396/alfahim.v4i1.226>
- Widodo, T., Muhammad, I., Darmayanti, R., Nursaid, N., & Amany, D. A. L. (2023). Manajemen keuangan pendidikan berbasis digital: Sebuah kajian pustaka. *Indonesian Journal of Educational Management and Leadership*, 1(2), 146–167. <https://doi.org/10.51214/ijemal.v1i2.548>
- Zulaiha, S., Meisin, M., & Meldina, T. (2023). Problematika Guru dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar. *Terampil: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, 9(2), 163. <https://doi.org/10.24042/terampil.v9i2.13974>